

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang karena pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Untuk melaksanakan pembangunan dan mempercepat pembangunan nasional di segala bidang pemerintah tentunya memerlukan modal yang cukup besar, sementara kemampuan pemerintah dalam penyediaan modal sangat terbatas, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan dalam usaha untuk memperoleh dana yang lebih besar guna membiayai pembangunan (Amiruddin, 2005).

Investasi merupakan salah satu kunci dalam setiap pembicaraan tentang mendorong pertumbuhan ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui sangat rapuh terutama sejak tahun 1997. Menurut Kuncoro (2010), akumulasi modal sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun kinerja perekonomiannya. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk menciptakan iklim perekonomian dalam rangka mendorong terciptanya akumulasi modal yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

Dengan adanya pembentukan modal investasi, maka membuat pembangunan menjadi mungkin lebih baik, kendati dengan jumlah penduduk yang meningkat. Karena dengan laju pembentukan modal yang cepat dan besar, lambat laun akan mampu mengurangi kebutuhan akan modal asing. Namun demikian, di Negara berkembang bahkan terbelakang dengan tingkat penduduk yang besar, umumnya rasio investasi dengan jumlah penduduk masih sangat kecil. Dampaknya, sekalipun tabungan meningkat dengan pesat, tetap saja tidak cukup untuk investasi. Akibatnya adalah Negara ini tetap harus mengundang investasi asing yang belum tentu menguntungkan negaranya (Prasetyo, 2009).

Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, akumulasi uang luar negeri merupakan suatu gejala yang wajar. Hal ini dikarenakan kondisi tabungan dalam negeri yang masih rendah sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya investasi secara memadai dan negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pembangunan tersebut, pada umumnya menutup kesenjangan tersebut dengan mencari sumber dari luar negeri. Sehingga tidak mengherankan apabila begitu besarnya arus modal dari negara maju mengalir ke negara yang sedang berkembang termasuk diantaranya Indonesia. Untuk itu pemerintah harus berusaha untuk mencari dana pinjaman dari pada donatur yang berasal dari luar negeri (Sapthu, 2013).

Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang menjadi tujuan dari kegiatan investasi, baik yang dilakukan oleh investor asing maupun yang dilakukan investor dalam negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Indonesia memerlukan investasi baru untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Namun ada beberapa faktor penting yang saling terkait satu dengan yang lainnya dan sangat kompleks yang menjadi bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain SDA, SDM, stabilitas politik dan keamanan guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, infrastruktur yang memadai dan faktor kemudahan dalam perizinan. Karena faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi keputusan seseorang atau perusahaan untuk melakukan penanaman modalnya di Indonesia.

Selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor lain yang sangat mempengaruhi kegiatan investasi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Investasi sebagai penanaman modal atau sering disebut juga dengan pembentukan modal merupakan suatu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat suatu daerah. Karena itu dalam pembangunan ekonomi, peranan investasi sangatlah penting. Semakin tinggi investasi, pendapatan di suatu daerah akan mengalami peningkatan terhadap barang dan jasa. Potensi ekonomi daerah mencakup potensi fisik dan potensi non fisik suatu wilayah seperti penduduk, sumber daya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial. Faktor penduduk yang dianalisis dalam kaitannya dengan daya tarik investasi daerah yang pertama adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah (Dumairy, 2004).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tingkat *output* diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan jasa. Fungsi produksi merupakan hubungan antara tingkat *output* (Y) dengan tingkat input. Tingkat input terdiri dari modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labour*). berdasarkan hal tersebut maka nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara langsung dipengaruhi oleh tingkat investasi yang merupakan perubahan kapital (ΔK) dan angkatan kerja yang merupakan labor (L) dalam fungsi produksi (Mankiw, 2000). Menurut Dumairy (2004) ketika terjadi kenaikan permintaan berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan merangsang para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa. Keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan akan mendorong dilakukannya investasi lebih banyak lagi.

Menurut Arsyad (2004) terdapat kaitan yang erat antara investasi dengan pendapatan nasional. Investasi yang merupakan fungsi pendapatan nasional semakin besar tingkat pendapatan nasional semakin besar pula pengeluaran investasi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, seperti tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB) (untuk tingkat nasional) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (tingkat regional) maka terdapat kecenderungan peningkatan pula dalam pembentukan modal domestik bruto. Secara prinsip hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran

investasi dapat diuraikan sebagai berikut. Produsen (investor) akan menanamkan modalnya jika proyek yang dilaksanakan menguntungkan. Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah investasi/proyek dapat diperkirakan mendatangkan keuntungan ialah adanya permintaan akan barang dan jasa dari masyarakat yang meningkat. Adapun peningkatan permintaan akan barang dan jasa merupakan salah satu dampak dari adanya peningkatan pendapatan. Dengan demikian adanya peningkatan pendapatan regional akan menimbulkan dampak terhadap meningkatnya permintaan barang dan jasa yang diminta. Hal ini sekaligus juga akan mengakibatkan meningkatnya jumlah proyek-proyek atau investasi yang dilaksanakan.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan regional mencerminkan kemampuan masyarakat di dalam wilayah tersebut untuk menyerap hasil produksi (*Ability to Purchase*), sehingga akan merangsang para investor untuk meningkatkan investasinya. Di samping itu tingginya pendapatan masyarakat juga mencerminkan kemampuan di dalam mengembalikan modal (*Ability to Pay*). Hal tersebut akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dengan pertimbangan modal yang ditanamkan, di masa yang akan datang bisa kembali (menguntungkan). Sehingga nampak jelas bahwa pendapatan regional berpengaruh terhadap investasi baik PMA maupun PMDN.

Provinsi Aceh merupakan salah provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, hal ini yang membuat para investor tertarik untuk melakukan investasi di Provinsi Aceh, namun dahulunya Provinsi Aceh merupakan daerah yang dilanda konflik yang berkepanjangan, sehingga sebelum

konflik berkepanjangan tersebut selesai banyak investor-investor enggan untuk melakukan investasi di Provinsi Aceh dikarenakan faktor keamanan tidak menjamin kepastian dalam berusaha. Namun setelah konflik yang berkepanjangan itu selesai dan pada saat yang bersamaan Provinsi Aceh dilanda musibah tsunami, dengan demikian Pemerintah Provinsi Aceh berusaha melakukan pembangunan dengan mendatangkan investor-investor untuk melakukan investasi di Provinsi Aceh. Saat ini usaha dari pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi mulai mendapatkan hasil, terlihat dari kurun waktu beberapa tahun setelah momen bersejarah di Provinsi Aceh yaitu musibah besar tsunami dan perdamaian investor mulai berdatangan untuk melakukan investasi di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh tahun 2011 – 2015 pada Tabel 1.1 berikut..

Tabel 1.1
Perkembangan Investasi dan PDRB di Provinsi Aceh
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Investasi (Rupiah)	PDRB (Rupiah)
2011	Rp. 32.980.775.860.000	Rp. 89.844.697.000.000
2012	Rp. 34.901.818.780.000	Rp. 94.290.896.200.000
2013	Rp. 34.736.027.050.000	Rp. 98.205.891.500.000
2014	Rp. 36.930.949.500.000	Rp. 102.154.486.400.000
2015	Rp. 38.599.761.850.000	Rp. 106.587.081.100.000

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2016)

Jika dilihat pada Tabel 1.1 mengenai perkembangan investasi di Provinsi Aceh pada tahun 2011 sebesar Rp. 32.980.775.860.000, selanjutnya pada tahun 2012 investasi di Provinsi Aceh meningkat menjadi Rp. 34.901.818.780.000. Namun pada tahun 2013 investasi di Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi Rp. 34.736.027.050.000. Kemudian pada tahun 2014 investasi di Provinsi

Aceh kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 36.930.949.500.000, dan selanjutnya di tahun 2015 investasi di Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi Rp. 38.599.761.850.000. Jika dilihat bahwa pergerakan perkembangan investasi di Provinsi Aceh secara garis besar bergerak secara positif dari tahun ke tahun, walaupun di tahun 2013 pembentukan modal investasi mengalami penurunan hal ini diakibatkan oleh stabilitas keamanan, artinya peningkatan investasi tidak hanya ditentukan oleh tinggi atau rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saja tetapi faktor stabilitas keamanan juga sangat menentukan, dikarenakan stabilitas keamanan di Aceh yang rentan membuat beberapa investor mengurungkan niat untuk menginvestasikan modalnya di Aceh, namun pada tahun selanjutnya pembentukan modal investasi terus mengalami peningkatan.

Selanjutnya jika dilihat pada tabel di atas bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh pada tahun 2011 sebesar Rp. 89.844.697.000.000, selanjutnya pada tahun 2012 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi Rp. 94.290.896.200.000. Pada tahun 2013 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi Rp. 98.205.891.500.000. Selanjutnya pada tahun 2014 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi Rp. 102.154.486.400.000, kemudian pada tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan menjadi Rp. 106.587.081.100.000. Jika dilihat bahwa pergerakan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi

Aceh secara garis besar bergerak secara positif dari tahun ke tahun. Dan hal ini juga menjadi hal yang sangat positif bagi Aceh untuk menarik investor masuk menanamkan modalnya di Aceh, dikarenakan faktor kemampuan dalam hal daya beli untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor pertimbangan serius bagi investor menanamkan modal di Aceh. Dengan begitu dirasa sangat penting bagi Pemerintah Aceh untuk tetap fokus dalam hal meningkatkan PDRB dan banyak faktor lainnya guna mendukung meningkatkan investor yang masuk ke Aceh, karena investor dapat masuk ke suatu wilayah apabila para investor merasa bahwa dengan menanamkan modal di wilayah tersebut mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan, kemudian juga merasa aman dalam melakukan kegiatan investasi dan juga banyak faktor lainnya.

Tetapi jika dilihat pada kegiatan investasi di Provinsi Aceh, saat ini terus meningkat dari tahun ketahun dengan didukung oleh salah satu faktor yaitu PDRB yang menjadi ketertarikan para investor masuk ke Aceh, namun kegiatan investasi di Aceh juga sering mengalami hambatan diluar dari faktor PDRB, yaitu stabilitas politik dan keamanan yang menyebabkan investor merasa tidak nyaman dalam menanamkan modal atau menginvestasikan modalnya di Aceh. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dirasakan masih lemah dan infrastruktur yang masih kurang, dikarenakan dahulunya Provinsi Aceh merupakan daerah yang pernah mengalami konflik yang berkepanjangan dan musibah tsunami 24 Desember 2004 yang telah banyak menimbulkan kerusakan infrastruktur di Aceh sehingga dirasakan pemerintah juga harus banyak melakukan perbaikan infrastruktur guna mendukung menarik investor untuk

menginvestasikan modalnya di Aceh. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Investasi di Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Investasi di Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2015?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk **“Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Investasi di Provinsi Aceh Tahun 2011 – 2015”**.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah Aceh, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Aceh yang fokus dalam meningkatkan investasi di Provinsi Aceh.

2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.